

SURAT TERBUKA  
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK DEMOKRATIK  
TIMOR-LESTE  
TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE

Kepada Yth. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan President Jose Ramos-Horta,

Seperti Bapak-bapak ketahui, pada bulan Juni tahun 2005 sebuah laporan diserahkan kepada Sekjen PBB oleh Komisi Pakar yang Meninjau Kembali Proses Pendakwaan Pelanggaran Berat HAM di Timor-Leste (waktu itu Timtim) pada 1999. Antara lain, laporan tersebut menyarankan supaya Indonesia meninjau kembali dakwaan yang sedang disidangkan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Leste, menyidiki dan mendakwa orang-orang yang disebut dalam dakwaan Wiranto cs, dan melaporkan hasil penyidikan tersebut kepada Sekjen PBB dalam waktu enam bulan terhitung dari tanggal yang akan ditentukan oleh Sekjen PBB. Laporan tersebut juga menyarankan supaya, seandainya upaya tersebut belum dimulai dalam jangka waktu yang ditentukan itu, Dewan Keamanan bertindak untuk "menciptakan sebuah pengadilan pidana internasional ad hoc untuk Timor-Leste".

Sebelum laporan itu sempat dipertimbangkan oleh Sekjen dan Dewan Keamanan PBB, pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mendirikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP) untuk "mengungkap secara tuntas kebenaran mengenai kejadian-kejadian menjelang dan segera sesudah jajak pendapat tahun 1999." Namun, sejak dibentuk, KKP itu ternyata banyak bermasalah. Masalah itu termasuk:

1. KKP tidak ada legitimasi. Hal itu disebabkan tiga faktor utama, yaitu: anggapan bahwa KKP didirikan untuk mencegah dibentuknya sebuah pengadilan pidana internasional untuk mengadili orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste pada tahun 1999; tidak adanya upaya menyelidiki tindak kejahatan yang dilakukan sebelum tahun 1999; dan kemungkinan pemberian amnesti, yang berarti para pelaku kejahatan berat dapat menghindar dari pertanggungjawaban.
2. KKP tidak ada prosedur yang jelas untuk meninjau kembali bukti-bukti yang sudah ada mengenai kekerasan tahun 1999 untuk mencapai kesepakatan tentang fakta-fakta peristiwa itu. Apalagi, instansi pemerintah Indonesia yang penting gagal menyerahkan surat-surat yang relevan.
3. Adanya kelemahan yang parah dalam sidang umum KKP, termasuk adanya beberapa anggota KKP yang jelas-jelas berat sebelah; didengarkannya kesaksian yang tidak relevan menurut mandat KKP sendiri; tidak adanya proses untuk membandingkan kesaksian yang diberikan dengan fakta-fakta yang terungkap oleh sidang-sidang sebelumnya, ataupun bukti-bukti nyata; adanya konflik antara anggota KKP Indonesia dengan anggota KKP Timor-Leste; tidak adanya bantuan atau perlindungan untuk para korban yang memberikan kesaksian; sifat ad hoc kesaksian yang diberikan; tidak adanya keseimbangan antara jumlah korban dengan jumlah pelaku yang memberikan kesaksian; serta dimanfaatkannya sidang KKP sebagai ajang di mana para pelaku dapat tetap menyalahkan PBB dan instansi-instansi lain untuk kekerasan yang terjadi.
4. Tidak adanya transparansi, kejelasan tujuan, ataupun jadwal jelas untuk pelaksanaan tugas KKP.

Dilihat dari mandatnya dan cara kerjanya, sudah jelas bahwa KKP tidak merupakan alat yang dapat dipercayai akan mencari keadilan ataupun kebenaran berkaitan dengan kejadian-kejadian di Timor-Leste pada tahun 1999, apalagi dari tahun 1975 sampai 1999. Maka, berdasarkan rasa hormat kepada para korban kekerasan maupun kedua negara yang bersangkutan sebagai negara hukum, kami yang bertanda-tangan di bawah ini, sebagai wakil organisasi HAM dan organisasi masyarakat lainnya di

Timor-Leste, Indonesia serta negara-negara lain, menghimbau supaya Bapak-bapak segera menarik dukungan Bapak-bapak dari KKP itu, dan mendukung proses pengadilan yang lebih kredibel.

*Special Panels for Serious Crimes* (SPSC - Sidang Khusus Kejahatan Berat) dari Pengadilan Negeri Dili dapat dihidupkan kembali untuk memproses dakwaan-dakwaan yang belum diselesaikan, asalkan pemerintah Indonesia setuju akan menyerahkan para tersangka yang berada di dalam wilayahnya, dan sidang itu diberikan sarana dan dukungan politik yang lebih baik daripada yang diberikan pada masa lalu. Misi Terpadu PBB di Timor-Leste telah membuat langkah pertama dalam upaya tersebut dengan berjanji akan menyelesaikan penyidikan yang masih belum selesai pada saat Kesatuan Kejahatan Berat dibubarkan terlalu dini pada tahun 2005.

Mengingat bahwa KKP pasti akan gagal total, maka kami menghimbau supaya SPSC itu dihidupkan kembali. Seandainya hal itu tidak dapat dilaksanakan, kami akan tetap menyerukan supaya didirikan sebuah pengadilan pidana internasional sesuai dengan saran laporan Komisi Pakar.

Upaya-upaya lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah kedua negara untuk menangani pelanggaran HAM yang dilakukan selama pendudukan Timor-Leste oleh Indonesia adalah meminta supaya Dewan Keamanan PBB melaksanakan saran yang dibuat oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dalam laporannya tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor-Leste pada bulan Juni 2006, yaitu didirikannya sebuah lembaga Dana Solidaritas Internasional buat Timor-Leste. Selain itu, parlemen di kedua negara dapat mengadakan diskusi tentang cara mengimplementasikan saran-saran yang dimuat di *Chega!*, sebuah laporan yang disusun oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR).

Akhirnya, kami mohon perhatian Bapak-bapak atas sepucuk surat tertanggal 4 Mei yang ditulis kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon oleh Pusat Internasional untuk Keadilan Transisional, dan sebuah pernyataan tertanggal 28 Maret dari Aliansi Nasional Timor-Leste buat Pengadilan Internasional. Kedua instansi itu juga mengecam KKP, dan mendesak supaya diciptakan sebuah lembaga yang dapat dipercayai akan meminta pertanggung-jawaban dari para pembesar yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste. Tanpa usaha tersebut, masalahnya tidak akan dapat diselesaikan. Dan kalau dibiarkan, masalah itu akan tetap menghalangi perkembangan demokrasi serta hormat buat negara hukum, baik di Indonesia maupun di Timor-Leste.

Dengan hormat,

Yasinta Lujina  
La'o Hamutuk (Timor-Leste Institute for Reconstruction  
Monitoring and Analysis)

Rosa Maria de Sousa, Executive Director  
FOKUPERS (Communication Forum for Timor-Leste Women)

Jose Luis Oliveira, Director  
HAK Association, Timor-Leste

Casimiro Dos Santos, Deputy Director  
JSMP (Judicial System Monitoring Programme), Timor-Leste

Nicolau Alves, Secretariat  
Timor-Leste National Alliance For International Tribunal

Edio Saldanha  
representing families of victims, Timor-Leste

Maria Afonso de Jesus  
Rate Laek (Victims group from Liquisa), Timor-Leste

Carolina do Ceu Brito  
Nuno Rodriguez  
Institution for Popular Education, Timor-Leste

Rafendi Djamin, Coordinator  
Human Rights Working Group, Indonesia

Usman Hamid, Coordinator  
KONTRAS, Indonesia

Rusdi Marpaung, Director  
Imparsial -- The Indonesian Human Rights Monitor

Garda Sembiring, Director  
PEC - People's Empowerment Consortium

Mugiyanto  
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia - IKOHI (Indonesian  
Association of Families of Disappeared)

Muridan S. Widjojo  
Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP), Jakarta

Sisto do Santos  
Front Estudante Timor-Leste, Timor-Leste

Maria Angelina Sarmento  
Executive Director, Timor-Leste NGO Forum (FONGTIL)

---

Dr Mark Byrne, Convenor  
Australian Coalition for Transitional Justice in East Timor

Sister Josephine Mitchell, Director  
Sister Susan Connelly, Assistant Director  
Mary MacKillop East Timor

Rob Wesley-Smith  
AFFET (Australians for a Free East Timor), Darwin

---

Antonio Dias and Bruno Kahn  
Agir pour Timor, France

---

John M. Miller  
National Coordinator  
East Timor and Indonesia Action Network, USA

James Goldston, Executive Director  
Open Society Justice Initiative, USA

Sharon Silber & Eileen B. Weiss  
Co-Founders, Jews Against Genocide, USA

Sr. Sheila Kinsey, OSF  
Justice, Peace & Integrity of Creation Office of the Wheaton  
Franciscans, U.S.A.

(Rev.) James Kofski  
Maryknoll Office for Global Concerns, USA

Ed McWilliams  
West Papua Advocacy Team, USA

Mark C. Johnson, Ph.D., Executive Director  
The Fellowship of Reconciliation, USA

---

Gus Miclat  
Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC)

Anselmo Lee, Executive Director  
Tadzrul Tahir Hamzah, Southeast Asia Sub-region Program  
Officer  
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-  
ASIA)

Roger S. Clark, Executive Committee  
International League for Human Rights

Graeme Simpson, Director, Country Programs Unit  
International Center for Transitional Justice

Charles Scheiner, International Secretariat  
International Federation for East Timor (IFET)

---

Maire Leadbeater  
Indonesia Human Rights Committee, New Zealand

---

Carmel Budiardjo, Director  
TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign, UK

Christine Allen, Executive Director  
Progressio, UK